

Genangan tak kunjung surut: Ketimpangan infrastruktur drainase di Paccerakkang

Kondisi Paccerakkang Biringkanaya saat banjir | Sumber: Tribun-Timur.com



Hujan jadi pembicaraan tahunan di Biringkanaya Makassar: Saluran air tersumbat, warga putus asa

Hujan seharusnya membawa kebahagiaan dan berkah bagi pekerja cocok tanam. Namun di kawasan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, hujan justru menjadi hal yang selalu dibicarakan. Setiap kali hujan turun, genangan air dengan cepat menguasai jalanan, merendam rumah-rumah dan, menenggelamkan harapan warga, serta menimbulkan kecemasan yang berulang, setiap kali hujan itu turun.

Ratna, salah satu warga Kelurahan Berua yang diwawancarai pada Rabu 18 Juni 2025, dengan nada putus asa mengatakan:

“Drainasenya sudah ditambah, tapi tidak menutup banjirnya. Kalau hujan, penuh tertutup jalan. Air dari wilayah atas dan pemukiman warga turun semua ke sini,” ujar Ratna sambil menunjuk drainase di tepi jalan.

Wilayah tersebut memang sudah termasuk langganan banjir, apalagi ketika musim hujan sudah tiba.

“Ketika banjir dalam beberapa jam saja, air itu sudah berkumpul disini. Sehingga pengendara yang ingin ke daerah sana itu mencari alternatif jalan lain. Karena di sini sudah tinggi mi banjirnya. Dan daerah ini termasuk daerah paling parah ketika musim hujan tiba,” jelasnya.



Wawancara warga setempat

Bukan hanya Ratna, Liah warga yang sudah menetap 10 tahun diperumahan Kodam, Paccerakkang itu menjelaskan bahwasannya dampak dari banjir tersebut, ia harus mengangkat barang dagangannya ketika hujan telah tiba.

“Kalau banjir, masalah utamanya itu karena got. Banyak orang bangun-bangunan sampai menutup saluran, jadi air tidak bisa mengalir,” keluh Liah.

Fenomena banjir yang rutin ini memperlihatkan bahwa sistem drainase di Paccerakkang, bahkan di sebagian besar Kota Makassar, belum mampu menjawab tantangan urbanisasi yang pesat dan perubahan iklim ekstrem.

Sistem drainase yang jauh dari kata memadai

Drainase wilayah Biringkanaya, Paccerakkang

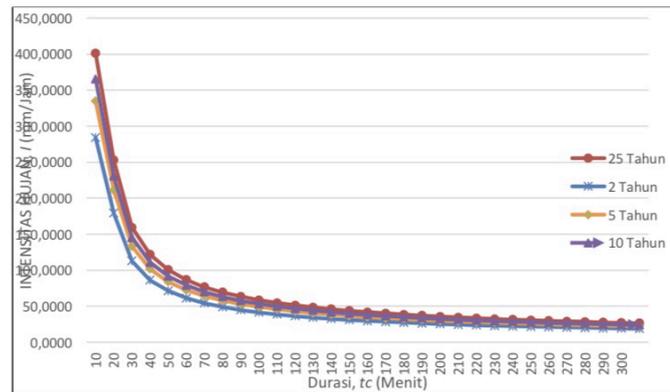


Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar melaporkan adanya tujuh titik drainase kritis di kota Makassar ini, di mana genangan air bisa mencapai lebih dari 50 cm dalam 24 jam. Di Paccerakkang, air bahkan bisa mencapai pinggang orang dewasa, memaksa warga mengungsi dan menghentikan aktivitas harian.

Masalah drainase di Makassar tidak hanya disebabkan oleh volume curah hujan yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruknya tata kelola saluran air, pembuangan sampah sembarangan, sedimentasi, serta pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan tata ruang turut memperburuk keadaan.

Rendahnya daya serap air menjadi faktor penyebab

Sumber: Jurnal



Gambar 2. Grafik Hubungan Intensitas Curah Hujan Untuk Konsentrasi Kala Ulang 2 Tahun, 5 Tahun, Dan 25 Tahun

Masalah drainase di Jalan Paccerrakang, Makassar, bukan hanya sekedar insiden tahunan yang bisa diabaikan, melainkan cerminan dari persoalan fundamental dalam tata kelola perkotaan yang mendesak untuk diadvokasi.

Berdasarkan studi literatur baik melalui observasi lapangan dan online, permasalahan drainase di kota-kota besar seperti Makassar umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan antropogenik (segala sesuatu yang disebabkan karena aktivitas manusia).

Curah hujan yang tinggi, elevasi lahan yang rendah, serta keberadaan pasang surut air laut seringkali menjadi pemicu utama. Namun, faktor manusia, seperti peningkatan populasi yang cepat, pembangunan permukiman yang tidak terkendali tanpa diikuti penambahan infrastruktur drainase yang memadai,

Data tahun 2023, memperlihatkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di kota Makassar hanya 11,47% dari luas wilayah kota. Sedangkan standar ideal proporsi RTH wilayah kota yang diatur undang-undang No. 26 Tahun 2007, tentang penataan Ruang adalah 30% dari luas wilayah kota. Kesenjangan ini menjadikan Makassar sebagai salah satu kota yang tidak ramah lingkungan, termasuk dapat diartikan sebagai kota yang tidak ramah terhadap siklus hidrologi yang menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Menurut Fadli Ghaffar selaku kepala divisi transisi energi berkelanjutan, ia mengatakan faktor utama banjir tersebut karena ruang terbuka hijau yang minim.

“Jadi ada banyak pelanggaran tata ruang di Makassar. Jadi pelanggarannya sebenarnya tidak secara langsung. Tapi dia mengakali aturan untuk pembangunan perumahan. Jadi pelanggaran tata ruangnya itu bukan karena di situ melarang. Tapi mereka justru mengubah aturannya menjadi boleh. Dan disitulah menjadi masalahnya,” ujar Fadli saat diwawancarai di kantor Walhi.

Proyek drainase: solusi atau sekadar formalitas?

Pada tahun 2023, pemerintah Kota Makassar menganggarkan pembangunan proyek drainase, termasuk pemasangan gorong-gorong di Paccerakkang. Namun proyek yang di gadang-gadang sebagai solusi banjir justru menuai protes warga.

Dikutip melalui pemberitaan media Tribun-Timur.com yang di tulis pada 15 Desember 2024, warga menyebut drainase itu “sia-sia” dan “tidak ada gunanya” karena banjir tetap terjadi meskipun hujan hanya satu jam. Jalan Paccerakkang yang menjadi penghubung utama Makassar dan Kecamatan Moncongloe, Maros lumpuh total saat banjir datang.

Kritik masyarakat bukan tanpa dasar. Proyek drainase menutup akses jalan selama pengerjaan, namun hasil akhirnya tidak mampu mencegah genangan. Banyak warga mempertanyakan perencanaan, pengawasan, dan transparansi penggunaan anggaran publik yang sudah habis miliaran rupiah, tetapi tidak membuahkan hasil yang nyata.

Pandangan pakar: drainase bukan sekadar soal saluran



Wawancara pihak Walhi Sulsel

Tingginya aktivitas masyarakat urban akibat penambahan jumlah penduduk telah mempengaruhi minimnya lahan hijau dan wilayah serapan hujan yang digunakan untuk menyediakan prasarana dan sarana perkotaan termasuk drainase air. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi baru dalam pengelolaan sistem drainase di Kota Makassar yang memiliki masalah seperti permukaan tanah yang relatif rendah, muka air laut yang tinggi, dan keterbatasan lahan hijau.

Menurut pengamat lingkungan dari Walhi, akar masalah drainase Makassar lebih dalam daripada sekadar saluran air yang mampet. Banyak wilayah resapan air diubah menjadi kawasan perumahan melalui revisi tata ruang yang disesuaikan.

“Drainase memang harus diperbaiki, tapi masalahnya bukan cuma di situ. Kalau RTH tidak ditambah, kalau sistem penanganan sampah tidak dibenahi, maka gorong-gorong seberapa pun lebarnya akan tetap gagal,” jelas pengamat lingkungan Walhi.

Selain itu, pengamat menyebut betonisasi yang masif mempercepat air menuju kanal, sehingga kanal meluap. Saluran air yang didesain justru menjadi tanggul, menahan air di tempat yang tidak seharusnya.

Banjir juga diperparah oleh pasang naik air laut. Ketika air pasang berbarengan dengan hujan deras, saluran tidak sanggup mengalirkan air keluar ke laut.

Kerentanan ekologi dan dampak jangka panjang

Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulsel mengungkapkan, tutupan hutan di Sulawesi Selatan tinggal 29,70%. Penurunan drastis ini berkontribusi pada kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Dari 139 DAS di Sulsel, hanya 38 yang masih sehat.

Hilangnya tutupan vegetasi mengakibatkan banjir dan longsor makin sering terjadi. Pada musim hujan 2025, beberapa daerah di Sulsel dilanda banjir dan longsor sebagai akumulasi dari kerentanan ekologi.

Bencana ini seakan menjadi “harga” yang harus dibayar akibat alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.

Walhi berharap pemerintah segera mengolah masalah tersebut.

Wali Kota ataupun Dinas Lingkungan Hidup itu harusnya mengawasi lebih ketat pelaku-pelaku usaha yang mempunyai potensi mencemari aliran drainase di Kota Makassar,” ujarnya

Suara pemerintah: Janji dan realisasi

Persoalan banjir dan infrastruktur dasar ini memang selalu menjadi keluhan utama warga. Mifta Khair dari Dinas Pekerja Umum (DPU) Makassar menyebutkan bahwa mereka memiliki masterplan drainase. Salah satu inovasi yang diusung adalah menutup saluran dengan plat beton agar tidak dijadikan tempat buang sampah.



Wawancara Dinas Pekerja Umum

Menurut Mifta, prioritas perbaikan difokuskan di Biringkanaya dan Manggala — wilayah dengan genangan terparah. Proyek drainase disebut sudah melalui lelang nasional, melibatkan konsultan perencana dan pengawas. Informasi proyek juga dipublikasikan di papan informasi agar masyarakat dapat memantau.

“Masalah drainase dan banjir itu biasanya kita melalui kelurahan berkoordinasi langsung dan selanjutnya kami dari dinas PU Kota Makassar akan menurunkan tim Satgas yang akan melakukan tugas untuk pemerintahan di lokasi laporan tersebut,” jelas Mifta melalui wawancaranya.

Namun, banyak warga berpendapat bahwa pengawasan di lapangan masih minim. Penanganan sering kali bersifat reaktif: setelah banjir terjadi, baru ada tindakan pembersihan.

Drainase dan kesehatan: ancaman ganda

Kondisi Drainase Paccerakkang yang penuh Limbah Rumah Tangga



Genangan air bukan hanya memutus akses jalan, tapi juga menjadi sarang penyakit. Air kotor yang menggenang berhari-hari menjadi tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah, meningkatkan risiko penyakit kulit, diare hingga infeksi saluran pernapasan.

“Dan juga kalau bisa gorong-gorong itu dibikin bersih, bukan sekedar bersih dari lumpur tapi bisa kelihatan jernih. Nah jadi karena kan gorong-gorong itu juga menjadi sumber penyakit. Selain daripada sumber banjir. Karena terlalu banyak zat-zat kimia di dalamnya. Dan juga kondisinya yang kumuh, yang penuh bakteri dan segala macam itu,” pungkas kepala divisi transisi energi berkelanjutan (23/06).

Liah menceritakan, bagaimana ia harus menjalani aktivitasnya ketika banjir datang melanda pemukimannya.

“Kalau sudah tinggi, tempat tidur sudah terendam. Kadang terpaksa mengungsi karena tidak bisa BAB di rumah.”

Trauma psikologis dan kerugian ekonomi menambah beban warga yang sudah harus berjuang dengan kerusakan barang dagangannya ataupun kendaraan yang rusak.

Solusi jangka panjang: Perlu kajian mendalam dan integrasi menurut Walhi,

Kota Makassar mendesak untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini menjadi dasar untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang kemudian menjadi acuan kebijakan pembangunan.

KLHS akan membantu pemerintah memetakan kerentanan wilayah, menganalisis risiko, dan menyesuaikan pembangunan dengan kapasitas lingkungan.

“Kalau tidak ada KLHS, izin pembangunan perumahan akan terus keluar di area resapan air, dan masyarakat yang menjadi korban,” tegas Fadli perwakilan Walhi.

Di samping KLHS, pemerintah juga perlu memperketat penerapan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) bagi pelaku usaha dan rumah tangga, guna mengurangi pencemaran drainase.

“Jadi yang saya maksud mencemari ini termasuk pelaku usaha yang membuang sampah dalam jumlah yang banyak. Membuang limbah restoran atau limbah hotel. Misalnya kayak limbah yang ada olinya,” tutur Fadli

Masyarakat: kunci terakhir yang kerap diabaikan

Selain peran pemerintah, masyarakat juga memegang kunci penting. Kesadaran kolektif untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi langkah dasar yang sering diabaikan.

Menurut Walhi,

“Kalau drainase dibersihkan setiap saat, tapi warga tetap buang sampah ke got, sama saja. Harus ada edukasi dan sanksi tegas.”

Di banyak kota maju, masyarakat berperan aktif dalam memelihara saluran air. Sementara di Makassar, partisipasi warga masih rendah. Hal ini memperlihatkan perlunya kampanye edukasi berkelanjutan agar warga merasa memiliki dan turut menjaga infrastruktur.

Melampaui sekadar proyek fisik

Drainase tidak bisa dilihat hanya sebagai proyek teknis. Ini adalah wajah kota, cerminan tata kelola, dan simbol kepedulian pemerintah kepada warganya.

Tanpa pendekatan holistik — mulai dari kebijakan tata ruang, pengelolaan RTH, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum lingkungan — proyek drainase hanya akan menjadi “penampung” keluhan, bukan penampung air hujan.

Selama itu pula, Paccerakkang akan terus tenggelam dalam genangan dan setiap tetes hujan akan berubah menjadi kecemasan kolektif yang tak kunjung surut.,